



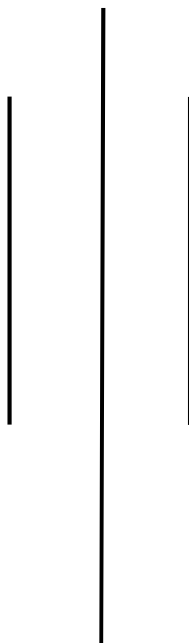
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2021

KECAMATAN BOJA



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

KECAMATAN BOJA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mendasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 diperlukan dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2016-2021, sehingga terdapat konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran sebagai bagian dari evaluasi audit kinerja yang mulai dilaksanakan tahun 2017. Dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjalanan roda Pemerintah Daerah.

Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja PD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra PD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja PD, selaras dengan Renstra PD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra PD berdasarkan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja PD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD.

Renja Kecamatan Boja Tahun 2021 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mendukung mewujudkan Misi Bupati Kendal Tahun 2016-2021. Adapun Misi Bupati Kendal yaitu: “Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif, efisien, bersih, bebas KKN”.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 6 Seri E No.4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 7 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 158) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 7 Seri E No. 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 7);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 82).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Boja Tahun 2021, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi, Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program–program, kebijakan–kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal. Serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip–prinsip **GOOD GOVERNANCE** .

Tujuan :

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Boja tahun 2021 adalah untuk merencanakan pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran–sasaran strategis, program–program pembangunan selama tahun 2021 yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kendal tahun 2016-2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja PD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi ulasan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah beserta dana yang dibutuhkan.

BAB V. Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Boja Tahun 2019 secara umum selaras dengan Renja Kecamatan Boja 2019, Capaian Renja Kecamatan Boja pada tahun 2019 pada umumnya tercapai, adapun capaian program dan kegiatan tahun 2019 diuraikan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pencapaian kinerja program pelayanan administrasi perkantoran adalah terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja Kecamatan Boja secara keseluruhan.

Kegiatan:

1) Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan jasa surat menyurat adalah tersedianya materai untuk kelancaran tugas kedinasan selama 1 (satu) tahun.

2) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, telepon dan listrik

Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik adalah pelunasan rekening telepon, listrik, air dan internet selama 1 (satu) tahun guna memperlancar kegiatan kedinasan.

3) Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan alat tulis kantor adalah tersedianya alat tulis kantor selama 1 (satu) tahun untuk memperlancar kegiatan kedinasan.

4) Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan adalah tersedianya blangko-blangko dan barang cetakan dan penggandaan (fotocopy) selama 1 (satu) tahun.

5) Penyediaan bahan bacaan dan perundang- undangan

Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan adalah tersedianya bahan bacaan/media cetak berupa koran 2 jenis selama 1 (satu) tahun.

6) Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan makanan dan minuman adalah tersedianya minuman pegawai, makanan minuman jamuan tamu dan rapat-rapat koordinasi selama 1 (satu) tahun.

7) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Pencapaian kinerja kegiatan rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan keluar daerah adalah terselenggaranya kegiatan perjalanan dinas dan tersedianya BBM dalam rangka kelancaran tugas kedinasan selama 1 (satu) tahun.

b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pencapaian kinerja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pengadaan aset peralatan dan mesin, pengadaan aset tetap lainnya, pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin.

Kegiatan:

1) Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Mesin

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan perlengkapan kantor.

2) Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan

Pencapaian kinerja kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan adalah terlaksananya pekerjaan pengecatan pendopo dan ruang kerja kantor.

3) Pengadaan aset peralatan dan mesin

Pencapaian kinerja kegiatan pengadaan aset peralatan dan mesin adalah pengadaan barang berupa genset, kursi roda, sketsel, kursi lipat, printer, laptop, meja rapat, kursi rapat dan sound system.

4) Rehab sedang/berat gedung dan bangunan

Pencapaian kinerja kegiatan rehab sedang/berat gedung dan bangunan adalah berdirinya bangunan ruang arsip yang semula merupakan halaman ruang pelayanan PBB.

c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Pencapaian kinerja kegiatan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah terlaksananya pelaporan kinerja keuangan kantor.

Kegiatan:

- 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya kegiatan penyusunan pelaporan LkjIP, LPPD, DPA, DPPA, LKPJ dan Renja.
- 2) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan keuangan daerah.

d. Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah

Pencapaian kinerja kegiatan program peningkatan dan kinerja aparatur pemerintahan adalah terlaksananya kegiatan peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur dan penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran dalam memenuhi hak pegawai tidak tetap.

Kegiatan:

- 1) Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur
Pencapaian kinerja kegiatan peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur adalah terpenuhinya pembayaran honor bagi Pejabat penatausahaan keuangan selama 1 (satu) tahun.
- 2) Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pencapaian kinerja kegiatan peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran adalah terpenuhinya pembayaran honor tenaga jasa kebersihan, tenaga linmas dan tenaga operator system selama 1 (satu) tahun.

e. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Pencapaian kinerja kegiatan program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa adalah terlaksananya pembinaan administrasi desa dan pendampingan pembuatan APBDes yang tepat sasaran.

Kegiatan:

- 1) Pembinaan Administrasi Desa
Pencapaian kinerja kegiatan pembinaan administrasi desa adalah terlaksananya monitoring pembinaan administrasi keuangan desa dan tertib buku administrasi desa se-Kecamatan Boja.
- 2) Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa
Pencapaian kinerja kegiatan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa adalah terlaksananya pendampingan dan pembinaan pembuatan APBDesa yang tepat sasaran serta tepat waktu.

f. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Pencapaian kinerja kegiatan program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH adalah terlaksananya pengawasan dan pengendalian keamanan wilayah serta kegiatan penunjang lainnya.

Kegiatan:

- 1) Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif
Pencapaian kinerja kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif adalah terlaksananya kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan KDH selama 1 tahun di wilayah Kecamatan Boja.
- 2) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Keagamaan
Pencapaian kinerja kegiatan koordinasi bidang keagamaan adalah terlaksananya kegiatan seleksi MTQ tingkat Kecamatan Boja dan pengiriman calon peserta MTQ di tingkat Kabupaten.
- 3) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Kelembagaan/Administrasi
Terlaksananya sosialisasi pembentukan BUMDes yang diikuti oleh 18 desa dan pembinaan kearsipan desa yang tertib dokumen dan arsip penting desa.
- 4) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan
Terlaksananya kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti oleh generasi muda.
- 5) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Pembangunan
Terlaksananya pelaksanaan musrenbangcam tingkat Kecamatan
- 6) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga
Terlaksananya kegiatan pembinaan PKK dan pelaksanaan Raker PKK
- 7) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang lingkungan hidup
Terciptanya taman kantor yang memberikan nilai tambah estetika pada halaman kantor Kecamatan Boja
- 8) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat
Terlaksananya kegiatan sosialisasi peningkatan kapasitas linmas desa se Kecamatan Boja dan tercapaian wilayah desa yang kondusif
- 9) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pertanian dan perikanan
Terlaksananya kegiatan sosialisasi pemanfaatan halaman dan pekarangan yang diikuti oleh 36 peserta

- 10) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kesehatan
Terlaksananya kegiatan sosialisasi pencegahan demam berdarah dan HIV
AIDS yang diikuti oleh 36 peserta
- 11) Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Terlaksananya kegiatan pembinaan PATEN yang diikuti oleh 18 desa se
Kecamatan Boja.

Tabel
T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Provinsi/Kabupaten/Kota Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Boja

Kode							Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2021	
											Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4							Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penunjang									
4	01						Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan									
4	01	13	01	01			Program Pelayanan Admininstrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi kantor secara tertib dan baik.	100	23.75	100	100	100	100	75.15	75.15
4	01	13	01	01	01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah meterai dan perangko	1000	2342	900	900	100	980	2672	74.8

4	01	13	01	01	02	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah dari jenis langganan internet, air, listrik dan telepon	12	36	12	12	100	12	48	100
4	01	13	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	12	36	12	12	100	12	48	63.15
4	01	13	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang tersedia	12	30	12	12	100	12	48	87.27
4	01	13	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis alat – alat listrik dan elektronik yang tersedia	0	1	1	1	100	0	1	25
4	01	13	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	Jumlah koran dan majalah yang tersedia	12	36	12	12	100	12	48	80
4	01	13	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah snack dan makan untuk kegiatan rapat serta minuman harian pegawai	10	36	12	12	100	12	48	73.84
4	01	13	01	01	18	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12	36	12	12	100	12	48	80
4	01	13	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana pelayanan umum sesuai standar	100	34.29	100	100	100	100	59.42	59.42
4	01	13	01	02	30	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan mesin	Jumlah peralatan kantor dan mesin yang diservis	18	44	25	25	100	15	70	49.29
4	01	13	01	02	46	Pengadaan aset peralatan dan mesin	Jumlah jenis aset peralatan kantor yang terpenuhi sesuai standar	6	32	0	0	0	9	41	82
4	01	13	01	02	53	Pemeliharaan rutin / berkala gedung dan bangunan	Jumlah gedung dan bangunan kantor yang diperbaiki	3	11	2	2	100	1	12	80

4	01	13	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kedisiplinan aparaturnya dalam mematuhi aturan yang ada	100	51.9	100	100	100	0	83.2	83.2
4	01	13	01	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan atribut yang terpesan	41	95	41	41	100	0	109	83.2
4	01	13	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan kinerja instansi pemerintah dan laporan keuangan semesteran / akhir tahun tepat waktu	100	26.67	100	100	100	100	75.55	75.55
4	01	13	01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun BERUPA LKJIP, RKA dan DPA, dll.	0	18	6	6	100	6	24	80
4	01	13	01	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun selama satu tahun	5	5	5	5	100	5	10	66.67
4	01	13	01	07		Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	Persentase pemenuhan pelayanan dan kinerja aparaturnya sesuai beban kerja atau tupoksi	100							
4	01	13	01	07	01	Peningkatan kinerja dan pelayanan aparaturnya	Jumlah pelayanan aparaturnya sebagai pengelola keuangan	5	36	12	12	100	12	48	90.56
4	01	13	01	07	02	Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah tenaga jasa kebersihan, sopir dan keamanan yang dibutuhkan	5	35	12	12	100	12	47	43.92

4	01	13	01	24		Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase kegiatan fasilitasi dan pendampingan kepada desa dan masyarakat desa dalam rangka pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa	100	21.01	100	100	100	100	49.02	49.02
4	01	13	01	24	03	Pembinaan Administrasi Desa	Jumlah kegiatan pembinaan administrasi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa	18	128	18	18	100	18	36	66.67
4	01	13	01	24	04	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Jumlah kegiatan Evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDes se Kecamatan Boja	18	36	18	18	100	18	54	75
4	01	13	01	24	05	Pendampingan KPMD	Jumlah kegiatan pendampingan KPMD dalam penyelenggaraan pembangunan desa	18	36	0	0	0	0	36	27.48
4	02					Pengawasan									
4	02	13	01	15		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, Kesra, Keuangan, Kesehatan, Keagamaan, Ekonomi dan PATEN	100	30.62	100	100	100	100	65.33	65.33
4	02	13	01	15	07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah kegiatan koordinasi pengawasan komprehensif	18	54	18	18	100	18	72	80
4	02	13	01	15	09	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan	Jumlah kegiatan koordinasi pengawasan komprehensif	170	522	170	170	100	170	692	76.12
4	02	13	01	15	10	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan	Jumlah kegiatan koordinasi bidang pemerintahan dalam rangka Evaluasi RAPBDes dan PBB P2	18	522	300	300	100	0	462	45.78

4	02	13	01	15	11	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kelembagaan / Administrasi	Jumlah kegiatan pembinaan bidang kelembagaan / administrasi desa terkait Tata naskah dinas dan Tusi perangkat desa	1	198	72	72	100	72	270	85.98
4	02	13	01	15	12	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan bidanglinmas di tingkat kecamatan	0	144	72	72	100	36	180	56.07
4	02	13	01	15	15	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan	Jumlah kegiatan koordinasi bidang pembangunan untuk Musrenbangcam	18	36	18	18	100	18	72	80
4	02	13	01	15	16	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang lingkungan hidup	Jumlah kegiatan koordinasi bidang lingkungan hidup	1	2	1	1	100	1	3	75
4	02	13	01	15	18	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan	Jumlah kegiatan koordinasi bidang kepemudaan	500	1300	500	500	100	172	1472	77.59
4	02	13	01	15	19	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah kegiatan koordinasi bidang PKK dalam rangka Raker Pengurus PKK dan Penyuluhan 10 program pokok PKK	180	456	180	180	100	130	586	48.91
4	02	13	01	15	20	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi	Jumlah kegiatan koordinasi bidang ekonomi untuk pameran produk unggulan kecamatan pada Kenda Expo	1	54	18	18	100	0	54	75
4	02	13	01	15	24	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kesehatan	Jumlah kegiatan bidang kesehatan	1	72	72	72	100	72	144	52.55
4	02	13	01	15	38	Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah pemohon PATEN (yang dilayani PATEN)	54	114	54	54	100	54	168	79.24

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Boja sesuai dengan Perbup nomor 8 Tahun 2016 mempunyai tugas dan fungsi pelayanan masyarakat, namun pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan Boja sebatas pada pemberian legalisasi Camat yang kemudian ditangani oleh Instansi lain, pelayanan KK/KTP oleh Catatan Sipil di wilayah Kecamatan Boja, SKCK oleh Polsek dan Polres, sebagian perijinan yang berskala kecil sedangkan perijinan yang berskala besar dilaksanakan oleh DPMPTSP dan sebagainya. Artinya baik buruknya pelayanan masyarakat pada proses pelayanan tersebut secara langsung yang mendapat aduan atau ketidakpuasan atas pelayanan publik adalah Kecamatan, untuk itu perlu bersinergi dengan instansi terkait dan melakukan kiat-kiat serta strategi dalam peningkatan pelayanan, misalnya kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan. Upaya jemput bola dengan sosialisasi ke desa-desa, pemeliharaan perangkat komputer agar selalu siap untuk melaksanakan kegiatan pelayanan.

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Boja
Kabupaten Kendal

NO	Indikator	SPM/stan dar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		
				Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (tnn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (tnn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Pemenuhan unit kerja internal yang terlayani(%)	Program Nasional yang harus dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Target terpenuhi
2	Pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja (%)	Penggunaan aset SKPD	Keberadaan inventarisasi barang atau aset SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Target terpenuhi
3	Pemenuhan laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah yang memenuhi standar (%)	Perencanaan pelaksanaan program dan anggaran	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Target terpenuhi
4	Pemenuhan Kinerja Pegawai SKPD (%)	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	Rasio PNS SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Target terpenuhi

5	Pemenuhan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (%)	Alokasi anggaran	Anggaran Desa terhadap total belanja APBDes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Target terpenuhi
6	Pemenuhan pelayanan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, Kesehatan, Kepemudaan, Keagamaan, ekonomi dan PATEN (%)	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Target terpenuhi

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Tingkat Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD.

Untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan kinerja pelayanan PD lebih dahulu harus dimengerti tentang kondisi PD, kondisi masyarakat, tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat di dalam menerima program-program Pemerintah Kecamatan Boja adalah kecamatan dengan kondisi yang dapat dikatakan minimalis mulai dari personil, fasilitasi dan sarana prasarana perkantoran. Dengan kondisi semacam itu maka pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan minimal, itupun belum memenuhi kriteria terutama pada fasilitasi pelayanan yang belum didukung adanya posko pengaduan dan kotak saran, sehingga pelayanan kepada masyarakat disesuaikan dengan kondisi yang ada.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.

Bahwa di dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Boja terdapat banyak permasalahan dan hambatan seperti telah diuraikan di atas. Dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, difokuskan pada peningkatan pelayanan masyarakat dengan meningkatkan sumber daya aparatur baik di tingkat Kecamatan maupun di desa.

3. Dampak terhadap pencapaian program Kepala Daerah, terhadap capaian program Nasional, seperti SPM dan isu strategis saat ini antara lain:
 - Pengurangan kemiskinan dan pengangguran
 - Kedaulatan pangan
 - Pembangunan infrastruktur

- Pelayanan publik dan perijinan
- Tata kelola pemerintahan, kondusifitas dan demokratisasi

Bupati Kendal selalu menekankan bahwa di dalam pencapaian program Kepala Daerah selalu disinergikan dengan program nasional seperti SPM dan isu strategis dengan selalu mengawasi perkembangannya.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan PD Kecamatan Boja adalah:

- Dengan peningkatan disiplin PNS, peningkatan kinerja PNS dengan tugas yang riil dan terukur
- Selektif memilih program/kegiatan dalam rangka peningkatan fasilitas, sarana prasarana kantor
- Evaluasi semua kegiatan pelayanan

Dengan demikian peluang dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan.

5. Formula isu-isu penting rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program/kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

- Setiap personil yang terlibat dalam perencanaan hendaknya menyadari dan mempunyai cara pandang kedepan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan PD
- Eksplorasi potensi yang ada dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan
- Evaluasi kegiatan, untuk menentukan sikap selanjutnya

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review RKPD (Renja) yang dilakukan adalah perbandingan antara perencanaan dalam Renja dengan realisasi akhir tahun sesuai dengan analisis kebutuhan serta dibandingkan dengan Renstra yang ada, namun demikian ada beberapa kegiatan yang memang tidak secara terus menerus dilaksanakan karena disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran yang ada. Demikian juga untuk kegiatan lain seperti Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang lingkungan hidup, kepemudaan dan perlindungan masyarakat tidak setiap tahun dilaksanakan karena menyesuaikan dengan besaran anggaran yang tersedia.

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Boja

No	Rancangan Awal RKPD (materi rumusan hasil musrenbang RKPD Tahun 2021)					Hasil Analisis Kebutuhan (materi RKPD Tahun 2021)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Administrasi Keuangan	Kecamatan Boja	-Tersedianya honor, gaji, tunjangan PNS (1 tahun) -Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (6 dokumen) - Jumlah penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun (5 dokumen)		2.608.098.808	Program Administrasi Keuangan	Kecamatan Boja	-Tersedianya honor, gaji, tunjangan PNS (1 tahun) -Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (6 dokumen) - Jumlah penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun (5 dokumen)		2.216.968.179	
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Boja	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	1.571.650.808	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Boja	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	1.352.918.179	
			Tunjangan TPP PNSD	14 bulan	1.027.600.000			Tunjangan TPP PNSD	14 bulan	858.000.000	
2	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kecamatan Boja	Jumlah dokumen kinerja yang tersusun	6 dokumen	6.050.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kecamatan Boja	Jumlah dokumen kinerja yang tersusun	6 dokumen	6.050.000	

No	Rancangan Awal RKPD (materi rumusan hasil musrenbang RKPD Tahun 2021)					Hasil Analisis Kebutuhan (materi RKPD Tahun 2021)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kecamatan Boja	Jumlah dokumen keuangan yang tersusun	5 dokumen	2.798.000	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kecamatan Boja	Jumlah dokumen keuangan yang tersusun	5 dokumen	0	

No	Rancangan Awal RKPD (materi rumusan hasil musrenbang RKPD Tahun 2021)					Hasil Analisis Kebutuhan (materi RKPD Tahun 2021)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Administrasi Umum	Kecamatan Boja	- Honor tenaga non PNS, Linmas dan kebersihan (6 orang) - Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia (4 jenis) - Jumlah laporan rakor dan konsultasi dalam serta luar daerah (140 laporan) - Jumlah pemeliharaan gedung dan bangunan kantor (2 unit) - Jumlah penyediaan bahan bacaan (12 bulan) - Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (9 jenis) - Jumlah penyediaan jasa komunikasi, internet, sumber daya air dan listrik yang terbayar (144 lembar) - Jumlah penyediaan jasa surat menyurat dalam setahun (1.125 buah) - Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor (31 jenis) - Jumlah penyediaan makanan dan minuman (16 kali) - Jumlah rehabilitasi sedang bangunan kantor (2 unit) - Terpeliharanya kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor, terbayarnya pajak kendaraan dinas (53 unit) - Tersedianya honor, gaji , iuran BPJS dan tunjangan PNS (1 tahun) - Tersedianya pengadaan printer, komputer, layar dan OHP proyektor, tiang dan mic, lemari, kursi (8 jenis)		694.818.286	Program Administrasi Umum	Kecamatan Boja	- Honor tenaga non PNS, Linmas dan kebersihan (6 orang) - Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia (4 jenis) - Jumlah laporan rakor dan konsultasi dalam serta luar daerah (140 laporan) - Jumlah pemeliharaan gedung dan bangunan kantor (2 unit) - Jumlah penyediaan bahan bacaan (12 bulan) - Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (9 jenis) - Jumlah penyediaan jasa komunikasi, internet, sumber daya air dan listrik yang terbayar (144 lembar) - Jumlah penyediaan jasa surat menyurat dalam setahun (1.125 buah) - Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor (31 jenis) - Jumlah penyediaan makanan dan minuman (16 kali) - Jumlah rehabilitasi sedang bangunan kantor (2 unit) - Terpeliharanya kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor, terbayarnya pajak kendaraan dinas (53 unit) - Tersedianya honor, gaji , iuran BPJS dan tunjangan PNS (1 tahun) - Tersedianya pengadaan printer, komputer, layar dan OHP proyektor, tiang dan mic, lemari, kursi (8 jenis)		303.640.000	

No	Rancangan Awal RKPD (materi rumusan hasil musrenbang RKPD Tahun 2021)					Hasil Analisis Kebutuhan (materi RKPD Tahun 2021)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Boja	Jumlah materai dan perangko dalam setahun	1.125 buah	5.600.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Boja	Jumlah materai dan perangko dalam setahun	1.000 buah	5.100.000	
5	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Boja	Jumlah rekening pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kecamatan Boja	144 lembar	51.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Boja	Jumlah rekening pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kecamatan Boja	144 lembar	44.400.000	
6	Penyediaan alat tulis kantor	Kecamatan Boja	Jumlah terpenuhinya kebutuhan ATK	31 jenis	40.000.000	Penyediaan alat tulis kantor	Kecamatan Boja	Jumlah terpenuhinya kebutuhan ATK	30 jenis	28.405.000	
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Boja	Jumlah tersedianya barang cetakan	9 Jenis	8.373.200	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Boja	Jumlah tersedianya barang cetakan	9 Jenis	8.373.200	
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Boja	Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia	4 jenis	2.115.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Boja	Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia	3 jenis	727.000	
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Boja	Jumlah penyediaan koran dan majalah	12 Bulan	2.544.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Boja	Jumlah penyediaan koran dan majalah	12 Bulan	1.560.000	

No	Rancangan Awal RKPD (materi rumusan hasil musrenbang RKPD Tahun 2021)					Hasil Analisis Kebutuhan (materi RKPD Tahun 2021)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Boja	Jumlah rapat koordinasi rutin serta tersedianya kebutuhan makan dan minum	16 Kali	25.960.000	Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Boja	Jumlah rapat koordinasi rutin serta tersedianya kebutuhan makan dan minum	8 Kali	12.650.000	
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kecamatan Boja	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi dalam serta luar daerah	140 laporan	160.100.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kecamatan Boja	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi dalam serta luar daerah	15 laporan	60.502.000	
12	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Boja	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diservice	22 unit	11.440.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Boja	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diservice	22 unit	0	
			Jumlah tenaga non PNs	24 Org/bln	42.000.000			Jumlah tenaga non PNs	24	20.400.000	
13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Boja	Jumlah gedung dan bangunan kantor yang dipelihara	2 unit	20.426.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Boja	Jumlah gedung dan bangunan kantor yang dipelihara	2 unit	0	
14	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Boja	Jumlah pajak kendaraan dinas	12 unit	4.800.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Boja	Jumlah pajak kendaraan dinas	12 unit	0	
15	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kecamatan Boja	Jumlah pejabat pengelolaan keuangan	5 orang	44.690.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kecamatan Boja	Jumlah pejabat pengelolaan keuangan	5 orang	44.690.000	

No	Rancangan Awal RKPD (materi rumusan hasil musrenbang RKPD Tahun 2021)					Hasil Analisis Kebutuhan (materi RKPD Tahun 2021)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kecamatan Boja	Jumlah tenaga kebersihan	12 org/bln	21.000.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kecamatan Boja	Jumlah tenaga kebersihan	12 org/bln	20.400.000	
17	Penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Boja	Jumlah peralatan dan perlengkapan personal komputer serta studio visual	6 jenis	46.808.000	Penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Boja	Jumlah peralatan dan perlengkapan personal komputer serta studio visual	5 jenis	29.609.000	
18	Pengadaan mebeleur	Kecamatan Boja	Jumlah aset mebeleur peralatan kantor yang memenuhi standar	2 jenis	21.300.000	Pengadaan mebeleur	Kecamatan Boja	Jumlah aset mebeleur peralatan kantor yang memenuhi standar	2 jenis	0	
19	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Boja	Jumlah kendaraan dinas yang diservice dan penggantian suku cadang	19 unit	55.087.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Boja	Jumlah kendaraan dinas yang diservice dan penggantian suku cadang	1 unit	28.907.000	
20	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Kecamatan Boja	Jumlah rehab bangunan gedung kantor	2 unit	128.575.086	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Kecamatan Boja	Jumlah rehab bangunan gedung kantor	2 unit	0	
	Program peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Kecamatan Boja	Jumlah pengadaan pakaian dinas harian (23 stel)		14.770.000	Program peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Kecamatan Boja	Jumlah pengadaan pakaian dinas harian (22 stel)		13.860.000	

No	Rancangan Awal RKPD (materi rumusan hasil musrenbang RKPD Tahun 2021)					Hasil Analisis Kebutuhan (materi RKPD Tahun 2021)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
21	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kecamatan Boja	Jumlah tersedianya pakaian dinas harian dan ID Card	23 stel	14.770.000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kecamatan Boja	Jumlah tersedianya pakaian dinas harian dan ID Card	22 stel	13.860.000	
	Program Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Kecamatan Boja	Jumlah peserta sosialisasi bidang kesehatan (36 orang)		7.975.000	Program Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Kecamatan Boja	Jumlah peserta sosialisasi bidang kesehatan (36 orang)		7.975.000	
22	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kecamatan Boja	Jumlah peserta sosialisasi bidang kesehatan	36 orang	7.975.000	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kecamatan Boja	Jumlah peserta sosialisasi bidang kesehatan	25 orang	1.445.000	
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Boja	Jumlah peserta sosialisasi PATEN (36 orang)		8.095.000	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Boja	Jumlah peserta sosialisasi PATEN (36 orang)		8.095.000	
23	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Kecamatan Boja	Jumlah peserta sosialisasi PATEN	36 orang	8.095.000	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Kecamatan Boja	Jumlah peserta sosialisasi PATEN	36 orang	8.095.000	

No	Rancangan Awal RKPD (materi rumusan hasil musrenbang RKPD Tahun 2021)					Hasil Analisis Kebutuhan (materi RKPD Tahun 2021)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Boja	- Jumlah partisipan bidang ekonomi (18 desa) - Jumlah peserta BUMDes dan Kearsipan desa (36 orang) - Jumlah peserta bidang keagamaan (26 orang) - Jumlah peserta bidang kepemudaan (72 orang) - Jumlah peserta bidang pembangunan (135 orang) - Jumlah peserta bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga (144 orang) - Jumlah peserta sosialisasi bidang lingkungan hidup (36 orang)		116.479.400	Program Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Boja	- Jumlah partisipan bidang ekonomi (18 desa) - Jumlah peserta BUMDes dan Kearsipan desa (36 orang) - Jumlah peserta bidang keagamaan (26 orang) - Jumlah peserta bidang kepemudaan (72 orang) - Jumlah peserta bidang pembangunan (135 orang) - Jumlah peserta bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga (144 orang) - Jumlah peserta sosialisasi bidang lingkungan hidup (36 orang)		70.110.000	
24	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Kecamatan Boja	Jumlah peserta musrenbangcam	135 orang	17.150.000	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Kecamatan Boja	Jumlah peserta musrenbangcam	130 orang	11.210.000	

No	Rancangan Awal RKPD (materi rumusan hasil musrenbang RKPD Tahun 2021)					Hasil Analisis Kebutuhan (materi RKPD Tahun 2021)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
25	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Kecamatan Boja	Jumlah partisipan Kendal Expo	18 desa	29.717.000	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Kecamatan Boja	Jumlah partisipan Kendal Expo	18 desa	20.410.000	
26	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Kecamatan Boja	Jumlah peserta raker PKK	144 orang	23.720.000	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Kecamatan Boja	Jumlah peserta raker PKK	148 orang	12.590.000	
			Jumlah peserta lomba MTQ	26 orang	13.402.400			Jumlah peserta lomba MTQ	75 orang	13.070.000	
			Jumlah peserta pelatihan paskibraka dan lomba duta wisata	72 orang	15.850.000			Jumlah peserta pelatihan paskibraka dan lomba duta wisata	70 orang	12.830.000	
			Jumlah peserta sosialisasi BUMDes	36 orang	8.550.000			Jumlah peserta sosialisasi BUMDes	36 orang	0	
			Jumlah peserta sosialisasi bidang lingkungan hidup	36 orang	8.090.000			Jumlah peserta sosialisasi bidang lingkungan hidup	36 orang	0	

No	Rancangan Awal RKPD (materi rumusan hasil musrenbang RKPD Tahun 2021)					Hasil Analisis Kebutuhan (materi RKPD Tahun 2021)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Boja	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (18 desa)		13.250.000	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Boja	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (18 desa)		12.000.000	
27	Sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Kecamatan Boja	Jumlah desa dalam kegiatan pengawasan	18 desa	13.250.000	Sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Kecamatan Boja	Jumlah desa dalam kegiatan pengawasan	18 desa	12.000.000	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Kecamatan Boja	Honor tenaga non PNS, Linmas dan kebersihan (6 orang)		73.440.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Kecamatan Boja	Honor tenaga non PNS, Linmas dan kebersihan (6 orang)		61.200.000	
28	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Boja	Jumlah tenaga linmas	36 org/bln	73.440.000	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Boja	Jumlah tenaga linmas	36 org/bln	61.200.000	

No	Rancangan Awal RKPD (materi rumusan hasil musrenbang RKPD Tahun 2021)					Hasil Analisis Kebutuhan (materi RKPD Tahun 2021)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyelenggaraan urusan pemeriharaan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Boja	Jumlah peserta sosialisasi bidang perlindungan masyarakat (36 orang)		7.975.000	Penyelenggaraan urusan pemeriharaan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Boja	Jumlah peserta sosialisasi bidang perlindungan masyarakat (36 orang)		7.380.000	
29	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kecamatan Boja	Jumlah peserta sosialisasi kapasitas Linmas	36 orang	7.975.000	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kecamatan Boja	Jumlah peserta sosialisasi kapasitas Linmas	36 orang	7.380.000	
	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kecamatan Boja	Jumlah peserta BUMDes dan Kearsipan desa (36 orang) Jumlah peserta evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes (18 desa) Jumlah peserta pembinaan administrasi desa (18 desa) Jumlah peserta pembinaan bidang pemerintahan (36 orang)		51.315.000	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kecamatan Boja	Jumlah peserta BUMDes dan Kearsipan desa (36 orang) Jumlah peserta evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes (18 desa) Jumlah peserta pembinaan administrasi desa (18 desa) Jumlah peserta pembinaan bidang pemerintahan (36 orang)		33.140.000	
30	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Boja	Jumlah peserta pembinaan administrasi desa	18 desa	10.100.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Boja	Jumlah peserta pembinaan administrasi desa	18 desa	6.450.000	
			Jumlah peserta sosialisasi kearsipan desa	36 orang	9.040.000			Jumlah peserta sosialisasi kearsipan desa	36 orang	9.040.000	

No	Rancangan Awal RKPD (materi rumusan hasil musrenbang RKPD Tahun 2021)					Hasil Analisis Kebutuhan (materi RKPD Tahun 2021)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
31	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kecamatan Boja	Jumlah peserta pembinaan rancangan peraturan desa tentang APBDes	18 desa	12.675.000	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kecamatan Boja	Jumlah peserta pembinaan rancangan peraturan desa tentang APBDes	18 desa	7.190.000	
			Jumlah peserta pembinaan intensifikasi PBB	36 orang	19.500.000			Jumlah peserta pembinaan intensifikasi PBB	36 orang	10.460.000	
	Jumlah				3.596.216.494.00					2.727.838.179	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan dari masyarakat pada umumnya tercantum dalam kegiatan Musrenbangcam, yaitu kegiatan untuk kepentingan umum, serta sarana prasarana pelayanan lainnya. Namun demikian kegiatan-kegiatan yang memerlukan anggaran yang cukup besar sangat bergantung pada kemampuan APBD Kabupaten Kendal, disajikan dalam Tabel T-C.32 sebagai berikut:

Tabel 4
Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Boja

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume (Rp)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Boja	-Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar (5 laporan) - Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas (100 prosen) - Prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja (100 prosen) - Prosentase unit kerja internal yang terlayani (100 prosen) - Rata-rata nilai sasaran kinerja pegawai (SKP) (86 rata-rata nilai SKP)	-783.218.915	
	Administrasi Keuangan	Kecamatan Boja	- Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (6 dokumen) - Jumlah penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun (5 dokumen) - Tersedianya honor, gaji, iurang BPJS dan tunjangan PNS (1 tahun)	- 391.130.629	
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Boja	- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	- 218.732.629	Subbag Perencanaan dan Keuangan
			- Tunjangan TPP PNSD	- 169.600.000	Subbag

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume (Rp)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Perencanaan dan Keuangan
2	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kecamatan Boja	Jumlah dokumen kinerja yang tersusun	0	Subbag Perencanaan dan Keuangan
3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kecamatan Boja	Jumlah dokumen keuangan yang tersusun	- 2.798.000	Subbag Perencanaan dan Keuangan
	Administrasi Umum	Kecamatan Boja	- Honor tenaga non PNS, Linmas dan kebersihan (6 orang) - Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia (4 jenis) - Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi dalam serta luar daerah (140 laporan) - Jumlah pemeliharaan gedung dan bangunan kantor (2 unit) - Jumlah penyediaan bahan bacaan (12 bulan) - Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (9 jenis) - Jumlah penyediaan jasa komunikasi, internet, sumber daya air dan listrik yang terbayar (144 lembar) - Jumlah penyediaan jasa surat menyurat dalam setahun (1.125 buah) - Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor (31 jenis) - Jumlah penyediaan makanan dan minuman (16 kali) - Jumlah rehabilitasi sedang bangunan kantor (2 unit) - Terpeliharanya kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor, terbayarnya pajak kendaraan dinas (53 unit) - Tersedianya honor, gaji, iuran BPJS dan tunjangan PNS (1 tahun) - Tersedianya pengadaan	- 391.178.286	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume (Rp)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			printer, komputer, layar dan OHP Projektor, tiang dan mic, lemari, kursi (8 jenis)		
4	Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Boja	Jumlah materai dan perangko dalam setahun	-500.000	Subbag Umum dan Kepegawaian
5	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Boja	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	- 6.600.000	Subbag Perencanaan dan Keuangan
6	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Boja	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diservice	- 14.440.000	Subbag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah tenaga non PNS	- 21.600.000	Subbag Umum dan Kepegawaian
7	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Boja	Jumlah pajak kendaraan dinas	- 4.800.000	Subbag Umum dan Kepegawaian
8	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kecamatan Boja	Jumlah pejabat pengelolaan keuangan	- 530.000	Subbag Perencanaan dan Keuangan
9	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kecamatan Boja	Jumlah tenaga kebersihan	- 600.000	Subbag Umum dan Kepegawaian
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kecamatan Boja	Jumlah terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	- 11.595.000	Subbag Umum dan Kepegawaian
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Boja	Jumlah tersedianya barang cetakan	- 1.553.200	Subbag Umum dan Kepegawaian
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Boja	Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia	- 1.388.000	Subbag Perencanaan dan Keuangan
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Boja	Jumlah peralatan dan perlengkapan personal komputer serta studio visual	- 17.199.000	Subbag Umum dan Kepegawaian
14	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Boja	Jumlah penyediaan koran dan majalah	- 984.000	Subbag Umum dan Kepegawaian

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume (Rp)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Boja	Jumlah rapat koordinasi rutin serta tersedianya kebutuhan makan dan minum	- 13.310.000	Subbag Perencanaan dan Keuangan
16	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Boja	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi dalam serta luar daerah	- 99.598.000	Subbag Perencanaan dan Keuangan
17	Pengadaan mebeleur	Kecamatan Boja	Jumlah aset mebeluer peralatan kantor yang memenuhi standar	- 21.300.000	Subbag Umum dan Kepegawaian
18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Boja	Jumlah gedung dan bangunan kantor yang dipelihara	- 20.426.000	Subbag Umum dan Kepegawaian
19	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Boja	Jumlah kendaraan dinas yang diservice dan penggantian suku cadang	- 26.180.000	Subbag Umum dan Kepegawaian
20	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Kecamatan Boja	Jumlah rehab bangunan gedung kantor	- 128.575.086	Subbag Umum dan Kepegawaian
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kecamatan Boja	Jumlah pengadaan pakaian dinas harian (23 stel)	- 910.000	
21	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kecamatan Boja	Jumlah tersedianya pakaian dinas harian dan ID Card	- 910.000	Subbag Umum dan Kepegawaian
	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Boja	- Nilai rata-rata predikat akuntabilitas kinerja OPD yang dievaluasi (LkjIP) (65 skor) - Prosentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan laporan yang diterima (100 prosen) - Rasio temuan rekomendasi yang ditindaklanjuti secara tuntas (100 prosen) - Tingkat maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) (5 level SPIP)	- 6.530.000	
22	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan	Kecamatan Boja	Jumlah peserta sosialisasi bidang kesehatan	-6.530.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume (Rp)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	perangkat daerah dan instansi vertikal terkait				
23	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Kecamatan Boja	Jumlah peserta sosialisasi PATEN	0	Kasi Pelayanan Umum
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Boja	- Nilai rata-rata predikat akuntabilitas kinerja OPD yang dievaluasi (LkjIP) (65 skor) - Prosentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan laporan yang diterima (100 prosen) - Rasio temuan rekomendasi yang ditindaklanjuti secara tuntas (100 prosen) - Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (5 Level SPIP)	- 46.369.400	
24	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Kecamatan Boja	Jumlah peserta musrenbangcam	-5.940.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
25	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Kecamatan Boja	Jumlah partisipan Kendal Expo	-9.307.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
26	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan	Kecamatan Boja	Jumlah peserta Raker PKK	-11.130.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
			Jumlah peserta lomba MTQ	-332.400	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
			Jumlah peserta pelatihan paskibraka dan lomba duta wisata	-3.020.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume (Rp)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Jumlah peserta sosialisasi BUMDes	-8.550.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
			Jumlah peserta sosialisasi bidang lingkungan hidup	-8.090.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Boja	- Nilai rata-rata predikat akuntabilitas kinerja OPD yang dievaluasi (LkjlP) (65 skor) - Prosentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan laporan yang diterima (100 prosen) - Rasio temuan rekomendasi yang ditindaklanjuti secara tuntas (100 prosen) - Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (5 Level SPIP)	- 13.490.000	
27	Sinergritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Kecamatan Boja	Jumlah desa dalam kegiatan pengawasan	-1.250.000	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
28	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Boja	Jumlah tenaga linmas	- 12.240.000	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Boja	- Nilai rata-rata predikat akuntabilitas kinerja OPD yang dievaluasi (LkjlP) (65 skor) - Prosentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan laporan yang diterima	- 595.000	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume (Rp)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			(100 prosen) - Rasio temuan rekomendasi yang ditindaklanjuti secara tuntas (100 prosen) - Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (5 Level SPIP)		
29	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Boja	Jumlah peserta sosialisasi kapasitas Linmas	-595.000	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Boja	- Nilai rata-rata predikat akuntabilitas kinerja OPD yang dievaluasi (LkjIP) (65 skor) - Prosentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan laporan yang diterima (100 prosen) - Prosentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (100 prosen) - Rasio temuan rekomendasi yang ditindaklanjuti secara tuntas (100 prosen) - Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (5 Level SPIP)	- 18.175.000	
30	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Kecamatan Boja	Jumlah peserta pembinaan administrasi desa	- 3.650.000	Kasi Pemerintahan
			Jumlah peserta sosialisasi kearsipan desa	- 0	Subbag Umum dan Kepegawaian
31	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan	Kecamatan Boja	Jumlah peserta pembinaan rancangan peraturan desa tentang APBDes	- 5.485.000	Kasi Pemerintahan

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume (Rp)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	pendayagunaan aset desa		Jumlah peserta pembinaan intensifikasi PBB	- 9.040.000	Kasi Pemerintahan
	Jumlah			- 868.378.315	

2.6.Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target Capaian Fisik (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	Outcome	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
	a. Penyediaan Jasa Surat menyurat	4.730.000	4.730.000	100	100	Meningkatnya kelancaran kegiatan surat menyurat dan Administrasi Keuangan	Tersedianya meterai dan Perangko 980 lbr
	b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, Telphon dan Listrik	58.200.000,	41.501.401	100	71,31	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat yang baik	Tersedianya jasa komunikasi Air dan Listrik selama 12 bulan
	c. Penyediaan Alat Tulis Kantor	30.830.000,	30.760.118	100	99,77	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat yang baik	Tersedianya Alat Tulis selama 12 bulan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target Capaian Fisik (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	Outcome	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
	d. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.360.000	13.360.000	100	100	Meningkatnya kelancaran dalam pelayanan kepada masyarakat	Tersedianya 8 Jenis barang cetakan dan foto copy selama 12 bulan
	e. Penyediaan bahan bacaan dan perundang- undangan	4.950.000,	3.125.000	100	63,13	Meningkatnya Pengetahuan dan wawasan Aparatur	Tersedianya bahan bacaan(Koran dan Majalah) selama 12 bulan
	f. Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum	25.000.000,	25.000.000	100	100	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat yang baik	Tersedianya anggaran makan minum Pegawai dan Rapat/Kegiatan sebanyak 1052 dus

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target Capaian Fisik (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	Outcome	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
	g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan LuarDaerah	94.000.000	89.090.069	100	94,78	Meningkatnya koordinasi yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat	Tersedianya Fasilitas untuk koordinasi dan Perjalanan Dinas selama 12 bulan
2.	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur						
	a. Pengadaan Aset peralatan dan Mesin	119.990.000	119.010.000	100	99.18	Meningkatnya jumlah Sarpras Aparatur yang layak pakai	Terlaksananya belanja Modal 9 jenis
	b. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Mesin	20.000.000	17.691.500	100	88,46	Meningkatnya jumlah Sarpras Aparatur yang layak pakai	Terpeliharanya Peralatan Aset dan Mesin sebanyak 15 unit

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target Capaian Fisik (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	Outcome	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
	c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan	30.000.000	30.000.000	100	100	Meningkatnya jumlah Sarpras Aparatur yang layak pakai	Terlaksananya Perbaikan bangunan kantor Kecamatan Boja sebanyak 2 gedung
	d. Rehabilitasi sedang / berat gedung dan bangunan	42.650.000	42.650.000	100	100	Meningkatnya jumlah Sarpras Aparatur yang layak pakai	Terlaksananya Rehab Gedung Kantor Sekretariat 1 gedung

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target Capaian Fisik (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	Outcome	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						
	a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhisar realisasi kinerja SKPD	5.600.000	5.600.000	100	100	Meningkatnya tertib Administrasi dengan tepat waktu	Tersusunnya laporan LKJIP, LPPD, EKPD dan laporan yang lainnya sebanyak 6 dokumen
	b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5.210.000	5.210.000	100	100	Meningkatnya tertib administrasi dengan tepat waktu	Tersusunnya laporan keuangan daerah sebanyak 6 dokumen

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target Capaian Fisik (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	Outcome	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Aparatur Pemerintah						
	a. Peningkatan Kinerja dan pelayanan Aparatur	37.500.000	33.750.000	100	90	Meningkatnya tertib administrasi Keuangan	Terbayarnya honor Penatausahaan keuangan selama 12 bulan
	b. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	69.000.000	69.000.000	100	100	Meningkatnya kelancaran administrasi dan pelayanan masyarakat	Tersedianya anggaran untuk PTT dan Jasa Keamanan selama 12 bulan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target Capaian Fisik (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	Outcome	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH						
	a. Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif	9.000.000	9.000.000	100	100	Meningkatnya kondusifitas wilayah	Terlaksananya koordinasi pengawasan di 18 desa
	b. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Keagamaan	9.000.000	8.970.000	100	99,67	Meningkatnya Ketakwaan dan kedisiplinan aparatur	Terlaksananya kegiatan MTQ dengan peserta 170 orang
	c. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Pertanian dan perikanan	4.940.000	4.940.000,	100	100	Meningkatnya wawasan tentang pemanfaatan pekarangan	Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan halaman diikuti 30 orang

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target Capaian Fisik (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	Outcome	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
	d. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Administrasi/Kelembagaan	14.200.000	13.750.000	100	96,83	Meningkatnya peran dan fungsi lembaga dalam penyusunan kearsipan	Terlaksananya sosialisasi pembentukan BUMDes dan pembinaan kearsipan desa diikuti 90 orang
	e. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat	7.000.000	7.000.000,	100	100	Meningkatnya peran dan fungsi anggota Hansip Linmas	Terlaksananya pembinaan kapasitas linmas desa diikuti 72 orang
	f. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Pembangunan	8.800.000	8.800.000	100	100	Meningkatnya pengetahuan tentang penyusunan perencanaan yang baik	Terlaksananya Musrenc Bang Kecamatan dan Desa diikuti 18 desa

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target Capaian Fisik (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	Outcome	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
	g. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga	25.890.000	25.890.000	100	100	Meningkatnya peran serta TP PKK Desa/Kecamatan dalam pembangunan	Terlaksananya Raker dan Pembinaan PKK diikuti 180 orang
	h. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kesehatan	4.940.000	4.940.000	100	100	Meningkatnya pengetahuan tentang kesehatan	Terlaksananya sosialisasi pencegahan demam berdarah diikuti 100 orang
	i. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang lingkungan hidup	9.000.000,	8.200.000	100	91,11	Meningkatnya pengetahuan tentang Kebersihan Lingkungan	Terwujudnya taman kantor Kecamatan Boja

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target Capaian Fisik (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	Outcome	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
	j. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan	7.000.000,	7.000.000	100	100	Meningkatnya peran serta generasi muda dan apartur dalam pembangunan	Terlaksananya Lomba Olah Raga dalam peringatan HUT RI diikuti 172 orang
	k. Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	10.000.000	10.000.000	100	100	Meningkatnya pengetahuan Masyarakat tentang Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Telaksananya Sosialisasi tentang PATEN diikuti 54 orang

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target Capaian Fisik (%)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	Outcome	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa						
	a. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	9.500.000	9.500.000	100	100	Meningkatnya peran dan fungsi aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan	Tersedianya operasional pembinaan pmerintahan Desa diikuti 18 desa
	b. Pembinaan administrasi desa	49.360.000	49.360.000	100	100	Terlaksananya pembinaan administrasi desa	Meningkatnya tertib administrasi desa diikuti 18 desa

* (Sumber Data dapat diambil dari DPA/RKA/LAKIP/POK)

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program dan Kegiatan

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Boja merupakan salah satu Perangkat Daerah sebagai pelaksana kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut Camat mempunyai fungsi menyelenggarakan tugas-tugas umum Pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Desa, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Pembinaan Perlindungan Masyarakat, Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan Kesejahteraan Rakyat dan Pembinaan Pelayanan Umum, Pembinaan Kepemudaan.

a. Faktor-faktor Yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan diantaranya adalah:

- Pencapaian visi misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Boja diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Kendal, sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Boja merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi.

b. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

- Jumlah program dan jumlah kegiatan:

Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan pada Renja di Kecamatan Boja Tahun 2021 adalah 6 program dengan 31 kegiatan.

- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Boja sifat penyebarannya adalah di seluruh wilayah Kecamatan Boja dan melingkupi semua desa (18) Desa.

- Total kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber usulan Pendanaan, sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- b) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- c) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 - d) Penyediaan jasa surat menyurat
 - e) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - f) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - g) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - h) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - i) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - j) Penyediaan alat tulis kantor
 - k) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - l) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - m) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - n) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - o) Penyediaan makanan dan minuman
 - p) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - q) Pengadaan mebeleur
 - r) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - s) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - t) Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
 - u) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
- a) Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait
 - b) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**
- a) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
 - b) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan
 - c) Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan
- 4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**
- a) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan
 - b) Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a) Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a) Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa
- b) Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Tahun 2021 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2021 yang akan datang.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Kabupaten Kendal.

Boja, 13 Juli 2020
CAMAT BOJA

RIPURWANTO, S. H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196303101985101002



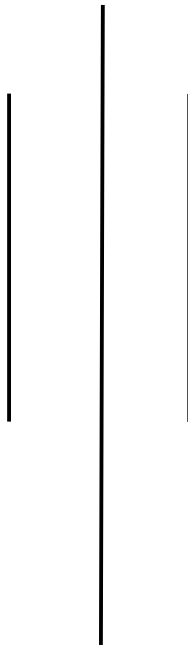
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

PERUBAHAN RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2021

KECAMATAN BOJA



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

KECAMATAN BOJA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2021 membawa konsekuensi logis adanya perubahan Renja Perangkat Daerah bagi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan dalam rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2021. Kecamatan Boja merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mengalami perubahan dalam rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan adanya penambahan dan pengurangan anggaran dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Kendal.

Penambahan dan penggeseran target kinerja dan pagu program, kegiatan dan sub perubahan RKPD tahun 2021 dilakukan dengan pertimbangan untuk kelancaran pelayanan dalam administrasi perkantoran serta mengefektifkan kinerja perkantoran, maka perlu pengadaan dana untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan

Publik kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sub kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa sub kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa, sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan, Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sub kegiatan Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi

Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 6 Seri E No.4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3);

28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 53 Seri E No. 38);
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 Nomor 77 Seri D No. 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 25);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan dalam menyusun program dan kegiatan pada perubahan APBD Tahun 2021;
- b. Memberikan acuan dalam menyusun indikator kinerja kegiatan pada perubahan APBD Tahun 2021;
- c. Memberikan acuan dalam kelompok sasaran kegiatan pada perubahan APBD Tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi ulasan tentang perumusan pendanaan, tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra Perangkat Daerah.

BAB IV. Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRI WULAN II TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

Berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Boja Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, diketahui bahwa rata-rata tingkat capaian kinerja dan rata-rata tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 35%. Adapun capaian tersebut termasuk dalam kriteria rendah. Pada Triwulan II hampir seluruh program belum terlaksana. Realisasi Capaian kinerja dan anggaran masing program pada Kecamatan Boja dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Hasil Evaluasi Program pada Kecamatan Boja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

Kode	Program	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	
		K	Rp.	K	%
7.01	Kecamatan Boja				
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	52	1.600.403.560,00	52	51%
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	50	75.418.000,00	50	50%
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	7	4.679.000,00	7	7%
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	40	35.100.000,00	40	40%

Kode	Program	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	
		K	Rp.	K	%
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	42	3.080.000,00	42	42%
7.01.06	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	17	5.500.000,00	17	17%
	Rata-Rata			35	35%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal. Pemerintah Kecamatan Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok :

- Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan

- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang meliputi aspek :

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Fasilitasi;
- f. Penetapan;
- g. Penyelenggaraan; dan
- h. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud kecamatan mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum ;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/ atau kelurahan;
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tupoksi tersebut dibagi menjadi beberapa Seksi dan Sub. Bagian antara lain Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi

Pelayanan Umum, , Subbag Perencanaan dan Keuangan, dan Subbag Umum dan Kepegawaian. Seksi dan Sub Bagian tersebut melaksanakan tugas sesuai dengan poin-poin yang tercantum dalam tupoksi Kecamatan.

Sedangkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan berlangsung sesuai dengan program dan kegiatan rutin yang selalu disusun sebelum tahun anggaran berjalan dan tidak terlepas dari program dan tujuan RPJMD Kabupaten Kendal.

Dalam bidang pelayanan umum, mempunyai aturan berupa SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan dalam pelaksanaan Pelayanan Umum berjalan sesuai dengan SPM tersebut.

Dalam Bidang Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan terealisasi berupa kegiatan monitoring secara rutin ke desa-desa. Serta kegiatan tanggap bencana, dan kesiapsiagaan anggota satpol PP.

Dalam berbagai pengiriman laporan sebagai bagian dari koordinasi dengan pemerintah atasan diupayakan selalu tepat waktu dan dijaga validitasnya.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dapat berasal dari beberapa unsur, sebagai berikut :

1. Keterbatasan kuantitas Sumber Daya Manusia di Tingkat Kecamatan, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pelayanan kepada masyarakat dirasa masih kurang optimal.
2. Kurangnya Anggaran, mengakibatkan keterbatasan ruang gerak Perangkat Daerah Kecamatan Boja dalam perencanaan maupun melaksanakan sebagian program kegiatan pemerintahan / pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati.
3. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah lain dalam mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pelaporan kepada pemerintah atasan
4. Disiplin aparatur yang belum optimal

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perubahan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Boja Tahun 2021 sudah sesuai dengan arah kebijakan dan program prioritas yang tercantum dalam RKPD 2021. Hal ini dikarenakan sifat tupoksi di Kecamatan Boja yang bersifat kegiatan rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun dengan anggaran yang sudah jelas.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Boja Tahun 2021 menitikberatkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, penurunan kemiskinan dan penurunan pengangguran disamping itu juga memperhatikan keterlibatan pemuda dalam pembangunan. Adapun secara rinci usulan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Boja Tahun 2021 diuraikan pada Lampiran 2. Sedangkan secara singkat hasil Rencana Perubahan Kegiatan tahun 2021 diuraikan sebagai berikut:

No.	Nama Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran Sebelumnya	Penambahan/ Pengurangan	Jumlah	Keterangan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Boja	12 bulan	Rp 2.460.918.179,00	(Rp 27.491.495,00)	Rp 2.433.426.684,00	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							

No.	Nama Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran Sebelumnya	Penambahan/ Pengurangan	Jumlah	Keterangan
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian dan emblem/ID card yang tersedia	Kecamatan Boja	20 Stel	Rp 13.860.000,00	(Rp 1.260.000,00)	Rp 12.600.000,00	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah							
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis alat listrik dan elektronik yang tersedia	Kecamatan Boja	4 jenis	Rp 727.000,00	Rp 800.000,00	Rp 1.527.000,00	
4	Penyediaan Pelengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan peralatan kantor dalam setahun	Kecamatan Boja	12 bulan	Rp 58.014.000,00	Rp 21.500.000,00	Rp 79.514.000,00	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Boja	12 bulan	Rp 6.820.000,00	Rp 906.400,00	Rp 7.726.400,00	
6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan tersedianya BBM dan belanja perjalanan dinas dalam setahun	Kecamatan Boja	12 bulan	Rp 36.502.000,00	Rp 27.356.000,00	Rp 63.858.000,00	

No.	Nama Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran Sebelumnya	Penambahan/ Pengurangan	Jumlah	Keterangan
7	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Boja	12 bulan	Rp 12.650.000,00	Rp 0,00	Rp 12.650.000,00	
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan	Kecamatan Boja	12 bulan	Rp 1.560.000,00	Rp 0,00	Rp 1.560.000,00	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Kecamatan Boja	5 laporan	Rp 6.050.000,00	(Rp 2.250.000,00)	Rp 3.800.000,00	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
10	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan	Jumlah bulan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Boja	12 bulan	Rp 28.907.000,00	Rp 6.177.500,00	Rp 35.084.500,00	

No.	Nama Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran Sebelumnya	Penambahan/ Pengurangan	Jumlah	Keterangan
	dinas jabatan	yang diperbaiki						
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/diperbaiki	Kecamatan Boja	3 unit	Rp 0,00	Rp 30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah							
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah bulan terbayarnya tagihan telepon, internet, air dan listrik	Kecamatan Boja	12 bulan	Rp 44.400.000,00	Rp 600.000,00	Rp 45.000.000,00	
13	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan terbayarnya honor tenaga administrasi	Kecamatan Boja	12 bulan	Rp 25.200.000,00	Rp 0,00	Rp 25.200.000,00	
14	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan materai dalam setahun	Kecamatan Boja	510 buah	Rp 5.100.000,00	Rp 0,00	Rp 5.100.000,00	
15	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan terbayarnya honor	Kecamatan Boja	12 bulan	Rp 69.360.000,00	(Rp 6.640.000,00)	Rp 62.720.000,00	

No.	Nama Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran Sebelumnya	Penambahan/ Pengurangan	Jumlah	Keterangan
		tenaga kebersihan						
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
16	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait	Kecamatan Boja	2 kegiatan	Rp 1.445.000,00	Rp 0,00	Rp 1.445.000,00	
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat							
17	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah peserta kegiatan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Kecamatan Boja	36 orang	Rp 8.095.000,00	(Rp 1.275.000,00)	Rp 6.820.000,00	

No.	Nama Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran Sebelumnya	Penambahan/ Pengurangan	Jumlah	Keterangan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa							
18	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Boja	2 Kegiatan	Rp 38.490.000,00	(Rp 22.400.000,00)	Rp. 16.090.000,00	
19	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang	Kecamatan Boja	18 desa	Rp 11.210.000,00	(Rp 1.005.000,00)	Rp 10.205.000,00	
20	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah desa yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan program kerjanya	Kecamatan Boja	18 desa	Rp 20.410.000,00	(Rp 7.460.000,00)	Rp 12.950.000,00	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum							

No.	Nama Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran Sebelumnya	Penambahan/ Pengurangan	Jumlah	Keterangan
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum							
21	Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah bulan Kegiatan pengawasan kewilayahan dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Kecamatan Boja	12 Bulan	Rp 12.000.000,00	Rp 7.500.000,00	Rp. 19.500.000,00	
	Kegiatan Koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah							
22	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan perangkat daerah yang melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Boja	12 Kegiatan	Rp 75.600.000,00	Rp 0,00	Rp. 75.600.000,00	

No.	Nama Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran Sebelumnya	Penambahan/ Pengurangan	Jumlah	Keterangan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							
23	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah peserta pembinaan tentang wawasan kebangsaan	Kecamatan Boja	36 orang	Rp 7.380.000,00	(Rp 1.200.000,00)	Rp 6.180.000,00	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							

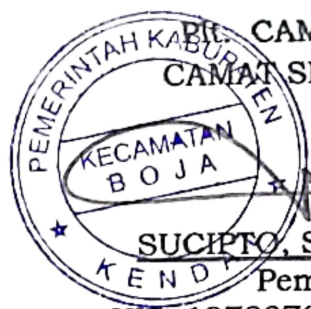
No.	Nama Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran Sebelumnya	Penambahan/ Pengurangan	Jumlah	Keterangan
24	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah desa yang dapat fasilitasi pendampingan administrasi tata pemerintahan desa	Kecamatan Boja	18 desa	Rp 15.490.000,00	(Rp 1.350.000,00)	Rp 14.140.000,00	
25	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang dapat fasilitasi pendampingan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kecamatan Boja	18 desa	Rp 17.650.000,00	Rp 0,00	Rp 17.650.000,00	

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Tahun 2021 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Perubahan Renja dilakukan sesuai dengan ketersediaan anggaran Pemerintah Kabupaten Kendal. Dalam pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Renja 2021 bersifat prioritas dan mendesak untuk dipenuhi dalam perubahan APBD 2021 dan tetap berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku.

Boja, 18 Agustus 2021

The stamp is circular with a double border. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL' at the top and 'KECAMATAN BOJA' at the bottom, separated by two stars. The center of the stamp contains the text 'CAMAT BOJA' and 'CAMAT SINGOROJO' stacked vertically. A signature is written across the stamp.
CAMAT BOJA
CAMAT SINGOROJO
SUCIPTO, S. STP., M.M.
Pembina
NIP. 197807041997031002